

**PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN *MANDATORY DISCLOSURE*
KONVERGENSI IFRS**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Akuntansi



Oleh :
BELLA NAUFAL FRISCADELLA
NIM : 2013310654

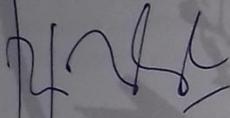
**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
S U R A B A Y A
2017**

PENGESAHAN ARTIKEL

Nama : Bella Naufal Friscadella
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 05 Agustus 1996
N.I.M : 2013310654
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Judul : Pengaruh Struktur *Corporate Governance* Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

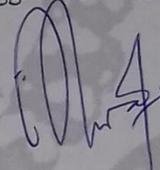
Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal : 13 Maret 2017



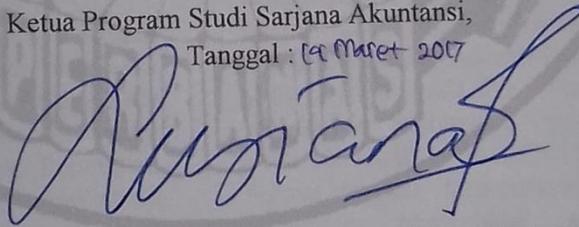
(Nurul Hasanah Uswati Dewi, SE., M.Si., CTA)

Co. Dosen Pembimbing,
Tanggal : 13 Maret 2017



(Dewi Murdiawati, SE., MM)

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi,
Tanggal : 14 Maret 2017



(Dr. Luciana Spica Alimilia., SE., M.Si., QIA., CPSAK)

PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN *MANDATORY DISCLOSURE* KONVERGENSI IFRS

Bella Naufal Friscadella
STIE Perbanas Surabaya
Email: bellanfd@gmail.com

Nurul Hasanah Uswati Dewi
STIE Perbanas Surabaya
Email: nurul@perbanas.ac.id
Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

In the era of globalization, requires accounting standards that can be adopted internationally, so the company can compare the financial report with other countries. The rules on accounting standards would make the company could not hide important information that must be presented in the company financial report. This study aims to determine the effect of corporate governance structure measured by the number of the board of commissioners, the number of audit committee, the number of the board directors, proportion of independent commissioners, managerial ownership, and institutional ownership. The method that's used in this study is the multiple linear regression. The result shows that corporate governance structure variables that effect is the number of the board of commissioners and institutional ownership. Other variables, namely the number of audit committee, the number of the board of directors, proportion of independent commissioners, and managerial ownership had no effect on the level of compliance with mandatory disclosure.

Key words : *Corporate Governance Structure, Mandatory Disclosure, and IFRS Convergence*

PENDAHULUAN

Penerapan standar akuntansi dengan berbasis IFRS di Indonesia dimulai pada tahun 2012. Sebelum tahun 2012, IFRS hanya diterapkan oleh perusahaan yang mampu mengadopsi IFRS saja. Penerapan IFRS pada perusahaan dapat meningkatkan daya saing perusahaan karena informasi yang disajikan memiliki kualitas di pasar modal internasional. Perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan informasi-informasi penting yang dimilikinya dapat merugikan pihak yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan.

Beberapa tahun terakhir, pengungkapan informasi yang terdapat pada laporan keuangan menjadi isu penting yang ada di Indonesia. Adanya kasus pelanggaran yang terjadi pada PT. Timah Tbk yang melakukan pemalsuan laporan keuangan pada semester 1 tahun 2015 menjadi bukti bahwa tingkat transparansi pada laporan keuangan perusahaan masih kurang. Laporan keuangan PT. Timah Tbk menyatakan bahwa perusahaan telah melakukan strategi yang tepat dan menghasilkan kinerja yang positif, tetapi berdasarkan realita yang terjadi pada semester 1 tahun 2015 PT. Timah Tbk

mengalami kerugian sebesar Rp 59 miliar. PT. Timah Tbk melakukan pemalsuan laporan keuangan karena ingin menutupi kinerja perusahaannya yang kurang sehat selama tiga tahun terakhir. Kinerja yang kurang sehat tersebut terlihat pada meningkatnya hutang perusahaan yang pada tahun 2013 memiliki jumlah sebesar Rp 263 miliar dan pada tahun 2015 hutang tersebut menjadi sebesar Rp 2,3 triliun. (<http://www.tambang.co.id/pt-timah-diduga-membuat-laporan-keuangan-fiktif-9640/>, diakses 2 November 2016)

Berdasarkan kasus tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan informasi merupakan sesuatu yang sangat penting. Informasi-informasi yang diungkapkan pada laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan dibagi menjadi pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi-informasi secara wajib pada laporan keuangan secara wajib pada laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pada standar akuntansi yang berlaku, sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan informasi-informasi keuangan yang dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Adina dan Ion (2008), tujuan adanya *mandatory disclosure* adalah untuk memenuhi informasi-informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan dan memastikan kualitas kinerja perusahaan apakah telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Perusahaan yang telah menerapkan standar akuntansi berbasis IFRS tidak memberikan jaminan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan pengungkapan semua informasi-informasi penting yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam melakukan pengontrolan atas informasi-informasi yang

diungkapkan oleh perusahaan, maka dibutuhkan peran dari *corporate governance*.

Pelaksanaan *corporate governance* merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menghindari permasalahan yang terjadi diantara komisaris dan direktur pada saat proses pengambilan keputusan. Dibutuhkannya *corporate governance* digunakan sebagai pendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan juga konsisten (Novianti, 2009).

Penelitian mengenai tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS ini sebelumnya telah dilakukan oleh Al Akra *et al*, (2010). Al Akra *et al*, (2010) meneliti tentang pengaruh dari regulasi pengungkapan akuntansi, reformasi tata kelola perusahaan dan perubahan kepemilikan, akibat privatisasi, pada kepatuhan pengungkapan wajib. Sampel yang digunakan sebanyak 80 perusahaan non keuangan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Al Akra *et al*, (2010) ini tidak dapat digeneralisasikan di berbagai negara, hal ini dikarenakan penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan yang ada di Yordania.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang diberikan oleh jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota komite audit, jumlah anggota dewan direksi, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

LANDASAN TEORITIS DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Agency theory yang diungkapkan oleh Jensen and Meckling (1976) merupakan teori yang menjelaskan mengenai seberapa penting adanya pemisahan kepemilikan dalam pengelolaan perusahaan oleh manajemen. Pemisahan tersebut dapat memberikan keuntungan kepada pemegang saham (*principal*) dalam mendapatkan jumlah keuntungan yang maksimal dengan biaya yang efisien. Manajemen perusahaan memiliki peran dalam menjalankan operasi perusahaan dan untuk memaksimalkan laba yang didapatkan, sedangkan pemegang saham hanya melakukan kontrol atas pengelolaan perusahaan untuk mengetahui apakah *agent* bekerja untuk memenuhi kepentingan perusahaan atau kepentingan pribadi (Adrian, 2012:13).

Pemisahan kepemilikan tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga dampak negative. Dampak negatif dari pemisahan kepemilikan adalah manajemen perusahaan memiliki kekuasaan lebih untuk mengambil keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan untuk kepentingan pribadinya. Hal tersebut dikarenakan pihak manajemen perusahaan merasa memiliki informasi yang lebih dibandingkan dengan pihak lain.

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat pemisahan kepemilikan tersebut dapat diminimalisir oleh perusahaan dengan cara melakukan penerapan *corporate governance*. *Corporate governance* dapat membuat manajemen perusahaan untuk mengungkapkan semua informasi-informasi penting mengenai perusahaan, sehingga mempermudah pemegang saham dalam melakukan kontrol atas perusahaan.

Menurut Adrian (2012:7), perusahaan yang menerapkan sistem *corporate governance* dengan baik maka secara tidak langsung juga member keyakinan kepada

pemegang saham atas investasi yang dilakukannya. Penerapan sistem *corporate governance* juga membantu perusahaan untuk meningkatkan pertumbuhan yang ada pada perusahaan sevara efisien.

Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Sejak tanggal 1 Januari 2012, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menetapkan bahwa Indonesia melakukan pengadopsian terhadap IFRS secara penuh, tujuannya untuk meningkatkan kualitas laporan tahunan suatu perusahaan dan agar informasi-informasi yang ada pada laporan tahunan tersebut dapat dengan mudah dipahami oleh para penggunanya.

Menurut Suwardjono (2005:578), pengungkapan diartikan sebagai bagian penting dari suatu pelaporan keuangan. Menurut Suhardjanto (2011), pengungkapan dibagi menjadi dua yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). *Mandatory disclosure* merupakan pengungkapan informasi-informasi secara wajib pada laporan tahunan sesuai dengan yang ditetapkan pada standar akuntansi yang berlaku. Sedangkan *voluntary disclosure* merupakan pengungkapan informasi-informasi keuangan yang dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan.

Peraturan yang mengatur mengenai *mandatory disclosure* telah diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-134/BL/2006 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik dan juga Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Secara Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

Corporate Governance

Corporate governance merupakan sistem pengendalian yang ada pada suatu perusahaan yang digunakan untuk mengelola risiko dan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan (Sari dan Diyah, 2015). Sedangkan Adrian (2012:1) megartikan *corporate governance* sebagai struktur yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan tetap berfokus kepada kepentingan pemegang saham sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut pedoman *Good Corporate Governance* (2006), prinsip-prinsip yang diterapkan dalam *Good Corporate Governance* adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Prinsip transparansi mengharuskan perusahaan untuk melakukan penyediaan informasi perusahaan harus membuat informasi tersebut mudah diakses dan mudah dipahami oleh para pengambil keputusan. Prinsip akuntabilitas mengharuskan perusahaan melakukan pengelolaan secara benar dan sesuai dengan kepentingan para pemegang saham. Prinsip responsibilitas mengharuskan perusahaan melakukan pengelolaan berdasarkan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya. Prinsip independensi mengharuskan perusahaan melakukan pengelolaan secara independen agar perusahaan tidak mudah diintervensi oleh pihak lain. Sedangkan, prinsip kewajaran mengharuskan perusahaan untuk mengutamakan para pemegang saham sehingga tidak menimbulkan permasalahan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas.

Perusahaan yang dapat menerapkan *corporate governance* dengan baik secara tidak langsung juga akan meningkatkan kualitas dan kinerja pada perusahaan tersebut. Selain itu, menurut Anggraeni dan Nurul (2015) perusahaan yang melakukan

penerapan *corporate governance* dengan baik juga dapat menghasilkan tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi daripada yang diharapkan oleh perusahaan.

Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Menurut Sutiyok dan Evi (2016), jumlah anggota dewan komisaris yang terdapat pada suatu perusahaan memiliki peran yang sangat penting didalam melakukan pemantauan terhadap kinerja perusahaan dan pada saat pengambilan keputusan.

Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* pada tahun 2006, menjelaskan bahwa pengurus perseroan terbatas (PT) yang ada di Indonesia dibagi menjadi dua bagian yaitu Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Dimana masing-masing Dewan memiliki tugas dan wewenangnya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh peraturan undang-undang.

Jumlah Anggota Komite Audit

Komite audit dapat diartikan sebagai komite yang memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan. Pengawasan tersebut dilakukan untuk menghindari adanya kecurangan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi. Selain melakukan pengawasan, komite audit juga memiliki tugas untuk menjadi perantara antara pemegang saham dengan dewan komisaris.

Menurut Adrian (2011) tanggung jawab komite audit dibagi menjadi tiga bagian yaitu laporan keuangan yang menjelaskan mengenai tanggung jawab komite audit dalam mengawasi apakah laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan telah menginformasikan keadaan perusahaan yang sesungguhnya, tata kelola perusahaan yang menjelaskan mengenai tanggung jawab komite audit dalam memastikan apakah ak-

tivitas yang dilakukan oleh manajemen perusahaan telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, dan pengawasan perusahaan yang menjelaskan mengenai tanggung jawab komite audit dalam mengawasi sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan.

Jumlah Anggota Dewan Direksi

Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* dewan direksi merupakan bagian dari perusahaan yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan atas perusahaan. Besarnya jumlah anggota direksi dapat disesuaikan dengan tingkat kebutuhan perusahaan.

Perusahaan juga harus tetap memperhatikan keefektifan dan ketepatan dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, jumlah minimal dari anggota dewan direksi adalah 2 orang. Pengangkatan atau pemberhentian pada dewan direksi dilakukan melalui rapat umum pemegang saham.

Proporsi Komisaris Independen

Adanya komisaris independen pada suatu perusahaan akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Peran yang dimiliki oleh komisaris independen yaitu melakukan pengawasan kepada manajemen perusahaan dalam melakukan penyajian informasi pada laporan tahunan sehingga tingkat transparansi yang ada pada laporan tahunan dapat dipastikan.

Adanya komisaris independen akan meningkatkan kualitas kinerja maupun laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Berdasarkan ketentuan yang jumlah ditetapkan, jumlah minimal dari komisaris independen adalah 30% dari total keseluruhan dewan komisaris.

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Barbara dan Eka (2016) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dianggap dapat menyeimbangkan perbedaan antara kepentingan manajemen perusahaan dengan kepentingan pemegang saham.

Peningkatan jumlah kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan, akan membuat manajemen perusahaan terus berusaha untuk meningkatkan kinerjanya. Semakin besar tingkat kepemilikan manajerial, membuat manajer akan semakin termotivasi karena adanya tanggung jawab untuk memenuhi segala keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah pihak manajemen itu sendiri.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional diartikan sebagai besarnya saham yang dimiliki oleh institusi. Institusi tersebut yaitu perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi yang lainnya. Kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.

Jika suatu perusahaan memiliki jumlah kepemilikan institusional yang besar, hal tersebut akan membuat manajemen perusahaan terdorong untuk meningkatkan nilai perusahaannya dan hal tersebut akan membuat kinerja perusahaan menjadi lebih meningkat. Adanya kepemilikan institusional akan membuat manajemen perusahaan untuk menyeimbangkan hubungan antara manajemen perusahaan dengan pemegang saham.

Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Komisaris terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS

Tanggung jawab yang dimiliki oleh dewan komisaris yaitu memastikan jalannya proses

pengoperasian perusahaan dan memprioritaskan kepentingan pemegang saham. Setiap anggota dari dewan komisaris diwajibkan untuk melakukan setiap tindakannya secara transparan atau terbuka dan memiliki itikad yang baik (Adrian, 2012:46). Semakin banyak jumlah dewan komisaris yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka perusahaan tersebut akan semakin cepat dalam melakukan proses pengambilan keputusan secara tepat dan berkualitas.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sutiyok dan Evi (2016) serta penelitian yang dilakukan oleh Barbara dan Eka (2016) menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca konvergensi IFRS. Oleh karena itu, hipotesis yang dirumuskan yaitu :
H₁ : Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS

Pengaruh Jumlah Anggota Komite Audit terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Komite audit memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan atas kebijakan-kebijakan mengenai akuntansi yang diterapkan oleh manajemen perusahaan, melakukan penilaian atas sistem pengendalian internal perusahaan, dan memeriksa tingkat kepatuhan perusahaan pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan (Sutiyok dan Evi, 2016). Jumlah anggota komite audit yang ada pada suatu perusahaan dianggap lebih efektif jika jumlahnya sedikit karena dengan begitu proses komunikasi dan koordinasi akan berjalan lebih efektif dan efisien.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Barbara dan Eka (2016) dan Wardani et al (2012) menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit memiliki pengaruh

signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca konvergensi IFRS. Oleh karena itu, hipotesis yang dirumuskan yaitu :

H₂ : Jumlah anggota komite audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Direksi terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Dewan direksi memiliki peran dalam melakukan pengelolaan terhadap perusahaan. Segala aktivitas yang terjadi pada perusahaan merupakan tanggung jawab dewan direksi. Banyaknya jumlah dewan direksi pada suatu perusahaan maka tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pada perusahaan tersebut juga tinggi.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari dan Diyah (2015) menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan direksi memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca konvergensi IFRS. Oleh karena itu, hipotesis yang dirumuskan yaitu:

H₃ : Jumlah anggota dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Komisaris independen memiliki peran dalam melakukan penyesuaian kepentingan para pemegang saham, hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak pemegang saham minoritas (Meiryanda, 2012). Adanya komisaris independen pada perusahaan membuat isi dari laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan lebih terarah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Isna Fauziah (2016) dan Wardani et al, (2012) menunjukkan bahwa proporsi

komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca konvergensi IFRS. Oleh karena itu, hipotesis yang dirumuskan yaitu:

H₄ : Proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Kepemilikan manajerial diartikan sebagai saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan (Sari dan Diyah, 2015). Semakin besar tingkat kepemilikan manajerial yang ada pada suatu perusahaan, hal tersebut menandakan bahwa kinerja perusahaan tersebut mengalami peningkatan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Isna (2016) dan Wulan et al, (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca konvergensi IFRS. Oleh karena itu, hipotesis yang dirumuskan yaitu :

H₅ : Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi

IFRS

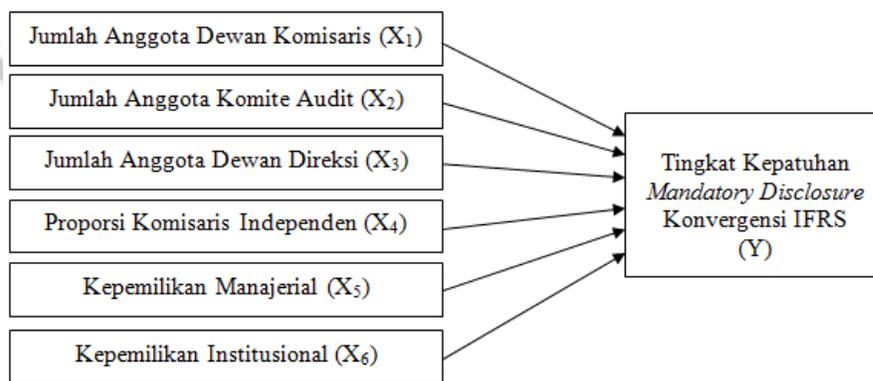
Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Kepemilikan institusional yang terdapat pada suatu perusahaan dapat membuat perusahaan melakukan peningkatan terhadap pengendaliannya untuk memaksimalkan kinerja manajemen perusahaan. Jika kepemilikan institusional pada suatu perusahaan memiliki jumlah yang besar, maka akan semakin besar juga tingkat pengendalian pada manajemen perusahaan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Isna (2016) dan Wulan et al, (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat *kepatuhan mandatory disclosure* pasca konvergensi IFRS. Oleh karena itu, hipotesis yang dirumuskan yaitu:

H₆ : Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Kerangka pemikiran yang mendasari dilakukannya penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber : Diolah

Gambar 1
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Klasifikasi Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan pertambangan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012 hingga tahun 2015. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu dengan metode purposive sampling. Metode *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya (Jogiyanto, 2007:79). Kriteria-kriteria tersebut antara lain : (1) Perusahaan termasuk kedalam perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). (2) Perusahaan menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2012 hingga tahun 2015.

Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber yang telah ada pada sebelumnya. Pada penelitian ini data yang digunakan yaitu berupa laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh perusahaan pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Laporan keuangan yang digunakan yaitu laporan keuangan dari perusahaan pertambangan pada tahun 2012 hingga 2015.

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan metode tidak langsung. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data yang telah tersedia pada *website* milik Bursa Efek Indonesia (BEI).

DEFINISI OPERASIONAL DAN PENGUKURAN VARIABEL

Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Menurut Sutiyok dan Evi (2016), jumlah anggota dewan komisaris yang terdapat pada suatu perusahaan memiliki peran yang

sangat penting didalam melakukan pemantauan terhadap kinerja perusahaan dan pada saat pengambilan keputusan.

Dalam penelitian ini, jumlah anggota dewan komisaris diukur dengan menggunakan jumlah anggota dewan komisaris yang memiliki hubungan dengan perusahaan dan jumlah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan.

Jumlah Anggota Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang memiliki tugas untuk membantu dewan komisaris dalam memastikan apakah laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan telah disajikan dengan wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang sedang berlaku (BAPEPAM-LK, 2010). Dalam penelitian ini, jumlah anggota komite audit diukur dari banyaknya jumlah anggota komite audit yang ada pada suatu perusahaan (Zaluki dan Hussin, 2009).

Jumlah Anggota Dewan Direksi

Dewan direksi diartikan sebagai organ perusahaan yang memiliki tanggung jawab dalam proses operasi perusahaan dan pengambilan keputusan perusahaan (Adrian, 2012:49). Dalam penelitian ini, jumlah anggota dewan direksi diukur dari banyaknya jumlah anggota dewan direksi yang ada pada suatu perusahaan (Sari dan Diyah, 2015).

Proporsi Komisaris Independen

Proporsi komisaris independen adalah jumlah dari anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan dibandingkan dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris (Haniffa dan Coke, 2005 dalam Wardani et al, 2012).

Pengukuran proporsi komisaris independen dilakukan dengan cara melakukan pembagian atas jumlah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki

hubungan dengan perusahaan dengan total keseluruhan jumlah anggota dewan komisaris.

Kepemilikan Manajerial

El Gazzar et al, (2006) mendefinisikan kepemilikan manajerial sebagai besarnya jumlah saham biasa yang dimiliki oleh dewan direksi dan dewan komisaris. Adanya saham yang dimiliki oleh pihak internal perusahaan akan membuat manajemen perusahaan lebih termotivasi dalam meningkatkan kinerja perusahaannya dan mengungkapkan segala informasi penting yang ada pada perusahaan.

Berdasarkan penelitian dari Wulan et al, (2012) kepemilikan manajerial diukur melalui jumlah presentase dari saham yang dimiliki manajemen perusahaan dari jumlah seluruh modal saham beredar yang dimiliki oleh perusahaan.

$$KM = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Manajemen}}{\text{Jumlah Seluruh Modal Saham yang Beredar}}$$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional diartikan sebagai jumlah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi perusahaan periode akhir tahun dan dibagi dengan jumlah saham perusahaan yang beredar. Institusi tersebut terdiri dari perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi yang lainnya.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulan et al, (2012) kepemilikan institusional diukur dengan cara melakukan pembagian atas presentasi jumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan dengan jumlah saham perusahaan yang beredar.

$$INST = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Seluruh Modal Saham yang Beredar}}$$

Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Proses pengidentifikasi item-item pengungkapan dilakukan dengan menggunakan Deloitte IFRS *Presentation and Disclosure Checklist* yang didapatkan melalui situs www.iasplus.com. Item-item yang dipilih pada *checklist* tersebut disesuaikan dengan PSAK yang berlaku dan wajib untuk diterapkan di Indonesia.

Tabel 1
PSAK yang Telah Konvergen dengan IFRS

No.	Nomor PSAK	Nomor IAS	Tanggal Efektif	Jumlah Item
1	PSAK 10	IAS 21	01-01-12	7 item
2	PSAK 26	IAS 23	01-01-12	2 item
3	PSAK 30	IAS 17	01-01-12	21 item
4	PSAK 56	IAS 33	01-01-12	7 item
Jumlah				37 item

Sumber : www.iaiglobal.or.id dan Deloitte IFRS *Presentation and Disclosure Checklist*

Variabel tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS diukur dengan menggunakan teknik *scoring*, dimana jika suatu perusahaan melakukan penerapan item yang diwajibkan untuk diungkapkan maka perusahaan tersebut akan diberi skor 1. Namun jika perusahaan tidak melakukan pengungkapan item tersebut, maka perusahaan akan diberi skor 0. Sedangkan jika perusahaan tidak melakukan penerapan item yang diwajibkan untuk diungkapkan maka akan diberi keterangan N/A. Persamaan yang digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS yaitu :

$$\text{MANDSCR}_{BY} = \frac{\sum \text{SCR}_{BY}}{\sum \text{MAX}_{BY}} \times 100\%$$

Pengukuran dengan menggunakan teknik *scoring* ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani et al, (2012), dimana MANDSCR_{BY} menunjukkan jumlah skor tingkat pengungkapan mandatory disclosure konvergensi IFRS perusahaan pertambangan pada tahun Y, SCR_{BY} menunjukkan jumlah pengungkapan item yang dilakukan oleh perusahaan, sedangkan MAX_{BY} menunjukkan jumlah nilai maksimal yang akan dicapai oleh perusahaan.

Teknik Analisis Data

Untuk menguji hubungan antara struktur *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012 hingga tahun 2015 maka digunakan analisis regresi linear berganda. Berikut ini merupakan model persamaan regresinya :

$$\text{MANDSCR}_{BY} = b_0 + b_1\text{KOM} + b_2\text{KOMAUDIT} + b_3\text{DIR} + b_4\text{KOMIN} + b_5\text{KEPMAN} + b_6\text{KEPINS} + e$$

Keterangan :

- MANDSCR = Tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS
 b_0 = Bilangan konstanta
 b_{1-7} = Koefisien regresi
 KOM = Jumlah anggota dewan komisaris
 KOMAUDIT = Jumlah anggota komite audit
 DIR = Jumlah anggota dewan direksi
 KOMIN = Proporsi komisaris independen
 KEPMAN = Kepemilikan manajerial
 KEPINS = Kepemilikan institusional
 e = Error

Teknik Analisis Data

Statistik Deskriptif

Statistic deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai suatu data yang dilihat melalui nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan juga nilai standar deviasi.

Tabel 2
Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Nilai Min	Nilai Maks	Rata-Rata	Std. Deviasi
MANDSCR	136	0,42778	1	0,7227	0,1418
KOM	136	2	13	4,691	2,008
KOMAUDIT	136	0	6	3,044	0,766
DIR	136	2	10	4,735	1,627
KOMIN	136	0	0,75	0,37	0,132347
KEPMAN	136	0	0,667	0,062	0,167
KEPINS	136	0	0,815	0,149	0,194

Sumber : Data diolah

Rata-rata tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS yang terdapat pada perusahaan pertambangan sebesar

72,27%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan di Indonesia belum sepenuhnya melakukan

pengungkapan atas informasi-informasi wajib yang dimiliki perusahaan untuk membantu pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian menunjukkan sifat homogen, karena rata-rata yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi.

Pada variabel jumlah anggota dewan komisaris menunjukkan nilai rata-rata sebesar 4,691 dengan standar deviasi sebesar 2,008 yang menunjukkan bahwa data bersifat homogen karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi. Sedangkan, berdasarkan nilai minimum yaitu sebesar 2 menunjukkan bahwa seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 yang menyatakan bahwa jumlah anggota dewan komisaris paling sedikit 2 orang.

Pada variabel jumlah anggota komite audit menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,044 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,766 yang menunjukkan bahwa data bersifat homogen karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi. Jika dilihat melalui nilai minimum perusahaan menunjukkan nilai sebesar 0. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat perusahaan yang tidak memiliki anggota komite audit. Tidak adanya komite audit pada suatu perusahaan akan berdampak pada lemahnya pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan.

Pada variabel jumlah anggota dewan direksi menunjukkan nilai rata-rata sebesar 4,735 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,627 yang menunjukkan bahwa data bersifat homogen karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi. Sedangkan, berdasarkan nilai minimum yaitu sebesar 2 menunjukkan bahwa seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan No-mor

33/POJK.04/2014 yang menyatakan bahwa jumlah anggota dewan direksi paling sedikit 2 orang.

Pada variabel proporsi komisaris independen menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,37 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,132347 yang menunjukkan bahwa data bersifat homogen karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi. Jika dilihat melalui nilai minimum yaitu sebesar 0, menunjukkan bahwa masih terdapat perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang masih belum memenuhi peraturan yang telah dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 yang menyatakan bahwa jumlah komisaris independen yang terdapat pada perusahaan *go public* paling sedikit sebesar 30% dari jumlah keseluruhan dewan komisaris.

Pada variabel kepemilikan manajerial menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,062 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,167 yang menunjukkan bahwa data bersifat heterogen karena nilai rata-rata lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar deviasi. Sedangkan berdasarkan nilai minimum yaitu sebesar 0 menunjukkan bahwa terdapat anggota dewan komisaris atau anggota dewan direksi selaku pihak internal yang tidak memiliki saham yang ada di perusahaannya.

Pada variabel kepemilikan institusional menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,149 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,194 yang menunjukkan bahwa data bersifat heterogen karena nilai rata-rata yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar deviasi. Jika dilihat berdasarkan nilai minimum yaitu sebesar 0 menunjukkan bahwa masih terdapat perusahaan yang sahamnya tidak dimiliki oleh institusi yang lain.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3
Uji Normalitas

N		136
Normal Parameters	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,13030309
Most Extreme Differences	Absolute	0,114
	Positive	0,114
	Negative	-0,070
Kolmogorov-Smirnov Z		1,328
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,059

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil uji normalitas yang ditunjukkan oleh tabel diatas menunjukkan pada jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota komite audit, jumlah anggota dewan direksi, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS yang ada pada tabel menunjukkan bahwa data tersebut memiliki nilai signifikansi sebesar 0,059, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Kesimpulan dari pengujian normalitas ini adalah data yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Tabel 4
Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
KOM	0,784	1,275
KOMAUDIT	0,822	1,216
DIR	0,531	1,883
KOMIN	0,949	1,053
KEPMAN	0,630	1,558
KEPINS	0,921	1,085

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas pada tabel diatas menunjukkan bahwa variabel jumlah anggota dewan komisaris memiliki nilai tolerance sebesar 0,784, jumlah anggota komite audit sebesar 0,822, jumlah anggota dewan direksi sebesar 0,531, proporsi komisaris independen sebesar 0,949, kepemilikan manajerial sebesar 0,630, dan kepemilikan institusional sebesar 0,921.

Pada hasil perhitungan dari nilai VIF (Variance Inflation Factor) menunjukkan bahwa variabel jumlah anggota dewan komisaris memiliki nilai sebesar 1,275, jumlah anggota komite audit sebesar 1,216, jumlah anggota dewan direksi sebesar 1,883, proporsi komisaris independen sebesar 1,053, kepemilikan manajerial sebesar 1,588, dan kepemilikan instirusional sebesar 1,085.

Jadi, berdasarkan hasil pengujian multikolonieritas dapat disimpulkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10. Selain itu, pada variabel independen juga tidak terdapat yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Hal ini mengartikan bahwa tidak terdapat multikolonieritas yang terjadi diantara variabel independen yang ada pada model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5
Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.
KOM	0,051
KOMAUDIT	0,480
DIR	0,479
KOMIN	0,731
KEPMAN	0,179
KEPINS	1,000

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil uji glejser pada tabel diatas menunjukkan bahwa variabel jumlah anggota dewan komisaris memiliki nilai signifikansi sebesar 0,051, jumlah anggota komite audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0,480, jumlah anggota dewan direksi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,479, proporsi komisaris independen memiliki nilai signifikansi sebesar 0,731, kepemilikan manajerial memiliki nilai signifikansi sebesar 0,179, dan kepemilikan institusional memiliki nilai signifikansi sebesar 1.

Nilai signifikansi yang dimiliki oleh variabel-variabel independen yang didapatkan melalui hasil output SPSS menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data penelitian.

Uji Autokorelasi

Tabel 6
Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,404	0,164	0,125	0,13329896	1,940

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil uji Durbin-Watson yang ada pada tabel diatas menunjukkan nilai DW sebesar 1,940. Nilai dari hasil pengujian tersebut akan dibandingkan dengan nilai yang ada pada tabel dengan menggunakan nilai signifikansi sebesar 5%, jumlah data yang digunakan sebagai sampel sebanyak 136 (n), dengan jumlah variabel independen sebanyak 6 variabel, maka nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai DW lebih besar dari nilai batas atas (du) 1,803 dan kurang dari 4 - 1,803 (4 - du). Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terdapat autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7
Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	Sig.
Constant	0,59	0,
KOMAUDIT	2,183	0,031
DIR	0,165	0,870
KOMIN	1,510	0,133
KEPMAN	0,813	0,418
KEPINS	-0,607	0,545
R	-3,808	0,000
R Square	0,404	
Adjusted R Square	0,164	
F	0,125	
	4,203	0,0001

Sumber : Data diolah

Jumlah anggota dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansinya sebesar 0,031 dimana nilai tersebut kurang dari 0,05. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Barbara dan Eka (2016) yang menyatakan bahwa banyaknya jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki oleh suatu perusahaan akan meningkatkan proses

pengawasan dan pengevaluasian sehingga perusahaan akan semakin banyak mengungkapkan informasi-informasi mengenai perusahaan dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, setiap penambahan jumlah anggota dewan komisaris juga akan meningkatkan nilai tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS karena pengawasan pada kinerja perusahaan akan semakin meningkat sehingga perusahaan cenderung mengungkapkan semua informasi yang dimilikinya guna mempermudah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Namun, hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani *et al*, (2012) yang menyatakan bahwa Jumlah anggota dewan komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS hal tersebut disebabkan karena menurut Wardani *et al*, (2012) jumlah anggota dewan komisaris pada setiap perusahaan akan memberikan dampak pada sulitnya proses pengambilan keputusan dan tidak dapat memberikan tekanan kepada dewan direksi.

Jumlah anggota komite audit memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansinya sebesar 0,870 dimana nilai tersebut lebih dari 0,05. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutiyok dan Evi (2016) yang menyatakan bahwa anggota dari komite audit tidak memiliki kemudahan dalam melakukan akses data pada data keuangan yang dimiliki oleh perusahaan jika dibandingkan dengan direktur keuangan, sehingga adanya komite audit tidak cukup untuk membuat manajemen perusahaan melakukan pengungkapan atas informasi-informasi penting yang dimilikinya. Selain itu, banyak perusahaan yang lebih memilih untuk menggunakan

anggota komite audit independen hanya untuk memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, hasil dari penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani *et al*, (2012) yang menyatakan bahwa jumlah anggota komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Hal tersebut disebabkan karena menurut Wardani *et al*, (2012) anggota komite audit pada suatu perusahaan dapat meningkatkan pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja perusahaan sehingga informasi yang disajikan oleh perusahaan akan semakin berkualitas.

Jumlah anggota dewan direksi memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansinya sebesar 0,133 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani *et al*, (2012) yang menyatakan bahwa perusahaan hanya berusaha untuk melakukan pemenuhan jumlah dewan direksi sesuai dengan peraturan yang telah dibuat Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 33/POJK.04/2014 yang menyatakan bahwa jumlah anggota dewan direksi yang ada pada perusahaan *go public* paling sedikit berjumlah 2 orang anggota dewan direksi, sehingga adanya anggota dewan direksi tidak mempengaruhi besarnya tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Namun, hasil dari penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Diyah (2015) yang menyatakan bahwa jumlah anggota dewan direksi memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS hal tersebut dikarenakan menurut Sari dan Diyah (2015) dewan direksi dianggap sebagai pihan yang memiliki tanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi pada perusahaan termasuk jika

perusahaan tersebut mengalami penyimpangan.

Proporsi komisaris independen memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansinya sebesar 0,418 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulan *et al*, (2012) yang menyatakan bahwa peran yang dimiliki oleh komisaris independen tidak maksimal karena jumlah dari anggota komisaris independen lebih sedikit jika dibandingkan dengan anggota komisaris yang berasal dari internal perusahaan. Selain itu, para pemegang saham cenderung lebih percaya terhadap komisaris yang berasal dari bagian internal perusahaan dibandingkan dengan komisaris independen. Hal tersebut dikarenakan komisaris yang berasal dari pihak internal dianggap lebih mengerahui informasi-informasi penting yang ada didalam perusahaan. Menurut Adrian (2011), adanya anggota komisaris independen yang ada pada perusahaan hanya untuk memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 33/POJK.04/2014 yang menyatakan bahwa jumlah minimal komisaris independen yang ada pada perusahaan sebesar 30% dari jumlah keseluruhan dewan komisaris. Namun, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Isna (2016) dan Wardani *et al*, (2012) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS hal tersebut dikarenakan menurut Isna , (2016) besarnya proporsi komisaris independen akan meningkatkan kualitas pengawasan dan semakin banyak pihak yang menuntut transparansi pada perusahaan.

Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi

IFRS. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansinya sebesar 0,545 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Diah yang menyatakan bahwa masih minimnya perusahaan yang melakukan penerapan kepemilikan saham oleh manajemennya. Selain itu, perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan manajerial yang terlalu kecil atau bahkan tidak memiliki kepemilikan manajerial yang menyebabkan manajer tidak terlalu termotivasi dalam mengungkapkan informasi-informasi yang diwajibkan di dalam laporan yang disajikan. Namun, hasil dari penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Isna (2016) dan Wulan *et al*, (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS hal tersebut dikarenakan menurut Isna (2016) tingginya tingkat kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan maka akan berdampak pada semakin besar tanggung jawab yang dimiliki oleh manajemen perusahaan atas seluruh pengungkapan informasi yang dimiliki oleh perusahaan.

Kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansinya sebesar 0,000 dimana nilai tersebut kurang dari 0,05. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Isna (2016) dan Wulan *et al*, (2012). Menurut Wulan *et al*, (2012) tingkat kepemilikan institusional yang tinggi dapat menyebabkan timbulnya pengawasan yang lebih besar yang dilakukan oleh pemegang saham. Oleh karena itu, jumlah kepemilikan institusional yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Hal tersebut karena adanya tuntutan dari institusi yang dapat membuat manajemen perusahaan akan melakukan pengungkapan seluruh

informasi-informasi yang diwajibkan pada laporan keuangan perusahaan. Namun, hasil dari penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Diyah (2015)) yang menyatakan adanya pengaruh tidak signifikan pada kepemilikan institusional terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS hal tersebut dikarenakan menurut Sari dan Diyah (2015) pihak yang berkepentingan (institusi) cenderung tidak memberikan perhatian lebih mengenai pengungkapan wajib yang dilakukan oleh perusahaan tetapi pihak yang berkepentingan lebih memperhatikan informasi-informasi yang digunakan untuk kepentingan pengambilan keputusan perusahaan

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan sampel yang digunakan didalam melakukan penelitian dan hasil pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan analisis regresi liner berganda dapat disimpulkan bahwa :

- a. Jumlah anggota dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.
- b. Jumlah anggota komite audit memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS
- c. Jumlah anggota dewan direksi memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.
- d. Proporsi komisaris independen memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.
- e. Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

- f. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.
- g. Tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) belum mencapai 100%. Hal ini dikarenakan penerapan standar akuntansi yang konvergen dengan IFRS dimulai pada tahun 2012, sehingga perusahaan belum melakukan pengungkapan secara sempurna. Tetapi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pada tahun 2012 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan persentase pada masing-masing tahun sebesar 68,87%, 72,16%, 72,86%, dan 75,21%.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Hasil dari penelitian ini tidak dapat digunakan pada jenis industry atau perusahaan lain. Hal tersebut dikarenakan item pengungkapan yang digunakan pada masing-masing industri belum tentu sama bergantung pada jumlah IAS yang dapat diterapkan pada industri tersebut. Contohnya, perusahaan pertambangan tidak menerapkan PSAK No. 14, namun PSAK No. 14 tersebut dapat diterapkan pada perusahaan manufaktur.
2. Subyektifitas peneliti dalam memahami data yang terdapat pada laporan keuangan sangat mempengaruhi hasil yang diinterpretasikan peneliti dalam mengukur jumlah pengungkapan informasi yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan.

Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah disebutkan, maka saran yang diberikan untuk peneliti selanjutnya adalah:

1. Mempertimbangkan peraturan terbaru mengenai PSAK yang telah konvergen dengan IFRS yang diterapkan pada jenis industry yang akan diteliti.
2. Melakukan pemahaman secara lebih mengenai setiap item yang digunakan didalam penelitian untuk menentukan apakah perusahaan yang diteliti telah mengungkapkan informasi-informasi yang diwajibkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adina, Popa dan Ion, Peres. 2008. "Aspects Regarding Corporate Mandatory and Voluntary Disclosure. Annals of the Univeristy of Oradea: Economic Science". *Volume. 3, No. 1, hal. 1407-1411.*
- Adrian, Sutedi. 2012. *Good Corporate Governance: Jakarta, Sinar Grafika*
- Al Mutawaa, A., & Hewaidy, A. M. 2010. "Disclosure level and compliance with IFRSs: An empirical investigation of Kuwaiti companies". *The International Business & Economics Research Journal, 9(5), 33.*
- Al-Akra, M., Ali, M. J., dan Marshdeh, O. 2009. "Development of Accounting Regulation in Jordan". *The International Journal of Accounting, Volume. 44, No. 2, hal. 136-186.*
- Al-Akra, M., Eddie, I. A., dan Ali, M. J. 2010. "The Influence of the Introduction Disclosure Regulation on Mandatorry Disclosure Compliance: Evidence from Jordan". *The British Accounting Review, Volume. 42, No. 3, hal. 170-186.*
- Anggita, P., dan Aditya Septiani. 2014. "Analisis Pengaruh Struktur Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Konvergensi IFRS Pada Laporan Laba Rugi Komprehensif". *Diponegoro Journal of Accounting, Volume. 3, No. 2, hal. 1*
- Anggraeni, Meliana dan Nurul Hasanah, U.D., (2015). "The effect of stock return and ownership structure on investment risk in manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange (IDX) 2011-2013". *The Indonesian Accounting Review, 5(2), Pp 187-196.*
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 2006. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Keputusan 134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik.*
- Barbara, G., dan Eka, R. H. 2016. "Peran Struktur Corporate Governance dalam Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Periode Setelah Konvergensi IFRS (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)". *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Volume. 1, No. 1.*
- Deloitte Touche Tohmatsu. 2015. *International Financial Reporting Standards Presentation and Disclosure Checklist 2015.* <http://www.iasplus.com/en/publications/global/models-checklists/2015/ifrs-checklist>. Diakses 5 Oktober 2016

- Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan. 2014. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik*.
- Djoko, Suhardjanto. 2009. "Praktik Penerapan Indonesian Environmental Reporting Index dan Kaitannya Dengan Karakteristik Perusahaan". *JAAI, Volume. 13, No. 1, hal. 63-67*.
- Dwi, W. U., Djoko, S., dan Sri, H. 2012. "Investigasi dalam Konvergensi IFRS di Indonesia: Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib dan Kaitannya dengan Mekanisme Corporate Governance". *Paper Dipresentasikan di Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin*.
- El-Gazzar, S.M., J.M. Fornaro dan R. A. Jacob. 2006. "An Examination of The Determinants and Contents of Corporate Voluntary Disclosure of Management's Responsibilities for Financial Reporting". *Lubin School of Business Working Paper*
- Gamayuni, R. R. 2009. "Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Menuju International Financial Reporting Standards". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 14(2), 153-166*.
- Hartono, Jogiyanto. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dari Pengalaman-Pengalaman. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta*
<http://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-1630743/bapepam-telusuri-salah-catat-laporan-keuangan-bakrie--brothers>. Diakses 19 September 2016
http://www.martinaberto.co.id/download/Peraturan_Bapepam/X.K.6_Kewajiba
- n_Penyampaian_Laporan_Tahunan_bagi_Emiten_dan_Perusahaan_Publik.pdf. Diakses 3 Oktober 2016
<http://www.neraca.co.id/article/19651/bapepam-endus-ada-penyelewengan-keuangan-di-grup-bakrie-konflik-internal-manajemen-muncul>. Diakses 12 Oktober 2016
<http://www.tambang.co.id/pt-timah-diduga-membuat-laporan-keuangan-fiktif-9640/>. Diakses 2 November 2016
- Imam, Ghazali. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Intan, I. 2009. "Adopsi Penuh dan Harmonisasi Standar Akuntansi Internasional". *Jurnal Ilmiah Widya Warta, 33(1), 69-75*.
- Isna, F. 2016. "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Pasca Konvergensi IFRS". *Esensi, Volume. 5, No. 2*.
- Jensen, Michael C., and William H. Meckling. "Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure." *Journal of financial economics 3, no. 4 (1976): 305-360*.
- Jogiyanto. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good*

- Corporate Governance*.
http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf.
Diakses 5 Oktober 2016
- Novianti, L. 2009. "Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Volume. 14, No, 2, hal. 211-232.
- Sari, R. N. I., dan Diyah, P. 2015. "Pengaruh Struktur Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib IFRS Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI.
- Suhardjanto, D., & Yulianingtyas, R. R. (2011). "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)". *JOURNAL OF ACCOUNTING AND AUDITING*, 8(1), 30-42.
- Sutiyok dan Evi, R. 2016. "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS di Perbankan". *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Volume. 15, No. 2, hal. 151-162.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta
- Wardani, P., Djoko, S., dan Hanung, T. 2012. "Peran Struktur Corporate Governance dalam Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS". *Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin*.
- Zaluki, N. A. Ahmad, dan W. N. W. Hussin. 2009. "Corporate Boards, Audit Comittes and Quality of Financial Disclosure in IPOs". *Malaysian Accountancy Research and Education Foundation: 1-44*.

